

PENULISAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI DALAM PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN BATU GAMPING ILEGAL



Diajukan oleh :

Pingkan Maura Polii

N P M : 210514374
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup & Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI DALAM PENGAWASAN
TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN BATU GAMPING ILEGAL**



Diajukan oleh :

Pingkan Maura Polii

N P M : 210514374
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup
& Hukum Adat**

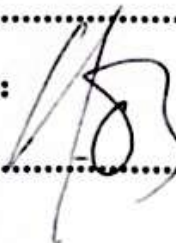
Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Hryonimus Rhiti, S.H., LL.M

Tanggal : 29/11/2024

Tanda Tangan:

.....

.....

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI DALAM
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN BATU
GAMPING ILEGAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **16 Desember 2024**
Tempat : **Ruang Pendaran 1 Lt.II**

Susunan Tim Penguji :
Ketua : **Dr.Rhiti Hyronimus, S.H., LL.M.**
Sekretaris : **Y.Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**
Anggota : **FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Prof. Dr. Hs Anita Christiani, S.H., M.Hum.
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batas Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II.....	19
PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	19
A. Pertambangan	19
1. Tinjauan Tentang Peran Pemerintah Daerah	19
2. Tinjauan Tentang Pertambangan	22
3. Tinjauan Perizinan Pertambangan	24
4. Tinjauan tentang Pengawasan.....	26
B. Peran pemerintah Kab. Gunungkidul dalam pengawasan terhadap kegiatan	

penambangan Batu Gamping Ilegal.	31
1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.....	31
2. Peran Dinas Kabupaten Gunungkidul	36
3. Penambangan Batu Gamping Ilegal	39
C. Kendala Bagi Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penambangan Batu Gamping Ilegal	45
1. Kendala	45
2. Solusi	47
BAB III	49
PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN.....	53

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena berkat karunia-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini berjudul “*Peran Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Di Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Penambangan Batu Gamping Ilegal*” dengan lancar. Skripsi ini dibuat guna jadi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sadar bahwasanya penyelesaian skripsi ini tak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari banyak elemen yang telah memberikan kontribusi besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, dengan rasa terima kasih mendalam, penulis ingin memberi penghargaan yang tinggi pada seluruh elemen yang sudah mendukung dari sisi moral, materiil, maupun ilmiah, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., sebagai Dekan DH Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hryonimus Rhiti, S.H., LL.M., sebagai Dosen Pembimbing atas bimbingannya, dukungannya dan arahnya yang begitu berharga saat penulis membuat kajian ini.
3. Bapak G. Aryadi, SH., Mum., yang jadi Dosen Wali akademis yang selalu membimbing penulis dalam mengambil rencana studi tiap semester.
4. Seluruh Dosen, staff dan karyawan FH UAJY yang telah jadi elemen penting pada perjalanan studi penulis saat menjalani perkuliahan di kampus
5. Ibu Nareswati Dwi Utari, S.T., selaku narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Bapak Idhiar Nugroho, S.T., selaku narasumber dari BPPE-SDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

7. Kedua orang tua tercinta Yulius Augustus Polii dan Arnitaria Helena Hutagaol yang konsisten memberi cintanya, kasih sayangnya, bimbingannya, dorongan dan doa pada penulis.
8. Kakak tercinta Marco Touar Polii yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
9. Kepada teman-teman yang sudah menemani penulis selama berkuliah di Jogja dan selalu memberikan dukungan.
10. Kepada Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. dan Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dosen penguji penulis
11. Seluruh elemen yang tak bisa dijabarkan semuanya. Terima kasih banyak atas doanya, motivasinya dan bantuannya yang diberi pada penulis

Penulis berharap bahwasanya hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kajian selanjutnya.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Penulis,



(Pingkan Maura Polii)

ABSTRAK

Peran Pengawasan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi permasalahan pertambangan Batu Gamping Ilegal yang sampai saat ini terjadi menimbulkan beberapa permasalahan baik dari sisi Ekonomi, Kesehatan, dan kerusakan lingkungan. Proses pengawasan beberapa ada yang efektif terkait dengan pemangku wilayah, serta banyak konflik internal dari pemangku wilayahnya, karena kemungkinan ada backingan pertambangan dari beberapa aparat dan petinggi daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kemudian, efek dari kegiatan pengolahan marmer dan pengangkutan bahan material juga berpotensi mencemari lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Aktivitas pertambangan yang tidak terdaftar sering dipandang sebagai penyebab kerusakan alam karena eksploitasi sumber daya alam dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan akibatnya. Akibat dari kegiatan tersebut ialah terganggunya banyak fungsi ekologis yang seharusnya dilindungi oleh alam.

Kata Kunci: Pemerintah, Pengawasan, dan Pertambangan Batu Gamping.

ABSTRACT

The supervisory role of the Gunungkidul Regency government in overcoming the problem of illegal limestone mining which until now has caused several problems both in terms of economics, health and environmental damage. There are some effective monitoring processes related to regional stakeholders, as well as many internal conflicts from regional stakeholders, because there is the possibility of mining backing from several regional officials and officials in Gunungkidul Regency.

Furthermore, the effects of marble processing and material transportation activities also have the potential to pollute the environment, which could pose a risk to public health. Unlicensed mining activities are often viewed as a cause of environmental degradation, as the exploitation of natural resources is carried out solely to meet human needs without regard for the consequences. The result of such activities is the disruption of numerous ecological functions that should be preserved by nature.

Keyword: Government, Supervision, Stone Miner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi / legal memorandum yang saya ajukan ialah hasil karya saya sendiri, tanpa adanya bentuk duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain. Apabila terbukti bahwasanya skripsi / legal memorandum ini mengandung unsur plagiasi dari karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pingkan Maura Polii', with a long horizontal flourish extending to the right.

Pingkan Maura Polii